

BAB I

ANALISIS MAKROEKONOMI

1.1 Perkembangan Makroekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi atau yang saat ini disebut dengan *modern economic growth* merupakan fenomena yang penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan *output* perkapita jangka panjang suatu negara yang harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat konsumsi barang dan jasa, serta daya beli masyarakat dalam suatu negara.

Angka makro ekonomi di Indonesia memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai indikator-indikator tertentu berkaitan dengan ekonomi makro Indonesia. Ekonomi makro di Indonesia merupakan sarana penting untuk mengevaluasi keadaan ekonomi Nasional. Terutama, analisis dari data statistik tersebut dapat memberikan prediksi kinerja ekonomi di masa yang mendatang. Beberapa indikator untuk mengukur ekonomi makro adalah produk domestik bruto, inflasi, hutang pemerintah, nilai tukar, neraca transaksi berjalan, penduduk, kemiskinan, pengangguran, serta cadangan devisa.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2004 hingga 2014 yang mana PDB tertinggi terdingginya mencapai 7.98% pada tahun

2014 dan PDB terendah sebesar 4.54% di tahun 2009. Pencapaian PDB yang rendah dipengaruhi oleh berbagai kondisi termasuk kontraksi secara ekonomi global yang berdampak kepada kegiatan ekonomi di sector riil domestik.

Menurut (Untoro, 2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi lain dari pertumbuhan ekonomi menurut Kementerian Keuangan *Learning Center* adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Sedangkan, menurut (Sukirno, 2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Perkembangan ekonomi makro terutama di tengah pandemic Covid-19 yang sedang terjadi secara global menjadi isu utama dunia terutama di Indonesia. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia di pasar saham mencapai Rp 4,1 triliun sedangkan *net outflow* Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 26,6 triliun. Sejalan dengan pergerakan IHSG, nilai tukar Rupiah juga

melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi Indonesia yang masih belum mengalami kasus Covid-19 pada Februari 2020, mampu menahan pelemahan Rupiah. Hingga pertengahan bulan Februari, nilai tukar Rupiah cenderung stabil pada kisaran Rp13.645 – Rp13.700 per USD. Seiring dengan mulai meningkatnya penyebaran virus Corona di luar Tiongkok, nilai tukar Rupiah berangsur melemah hingga ditutup sebesar Rp14.234 per USD pada 28 Februari 2020. Kondisi ini merupakan keputusan Bank Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pandemi Covid-19. Di bawah ini merupakan data statistik pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik.

Pertumbuhan Ekonomi								
	2018:1	2018:2	2018:3	2018:4	2019:1	2019:2	2019:3	2019:4
Produk Domestik Bruto (persen, YoY)	5,06	5,27	5,17	5,18	5,07	5,05	5,02	4,97
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	5,2	5,0	5,1	5,0	5,2	5,0	5,0
Konsumsi LNPRT	8,1	8,8	8,6	10,8	17,0	15,3	7,4	3,5
Konsumsi Pemerintah	2,7	5,2	6,3	4,6	5,2	8,2	1,0	0,5
PMTB	7,9	5,9	7,0	6,0	5,0	4,6	4,2	4,1
Ekspor Barang dan Jasa	5,9	7,6	8,1	4,3	-1,6	-1,7	0,1	-0,4
Impor Barang dan Jasa	12,6	15,2	14,0	7,1	-7,5	-6,8	-8,3	-8,0
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	3,3	4,7	3,7	3,9	1,8	5,3	3,1	4,3
Pertambangan dan Penggalian	1,1	2,6	2,7	2,2	2,3	-0,7	2,3	0,9
Industri Pengolahan	4,6	3,9	4,4	4,2	3,9	3,5	4,1	3,7
Listrik dan Gas	3,3	7,6	5,6	5,5	4,1	2,2	3,7	6,0
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	3,6	3,9	6,2	7,9	8,9	8,3	4,9	5,4
Konstruksi	7,4	5,7	5,8	5,6	5,9	5,7	5,6	5,8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	5,0	5,2	5,3	4,4	5,2	4,6	4,4	4,2
Transportasi dan Pergudangan	8,6	8,7	5,6	5,3	5,5	5,9	6,7	7,6
Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,6	5,9	5,9	5,9	5,5	5,4	6,4
Informasi dan Komunikasi	7,8	5,1	8,1	7,2	9,1	9,6	9,2	9,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,2	3,1	3,1	6,3	7,2	4,5	6,1	8,5
Real Estate	3,2	3,1	3,8	4,2	5,4	5,7	6,0	5,9
Jasa Perusahaan	8,0	8,9	8,7	8,9	10,4	9,9	10,2	10,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,8	7,2	7,9	7,1	6,4	8,9	1,9	2,1
Jasa Pendidikan	4,8	5,0	6,6	5,0	5,6	6,3	7,8	5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,1	7,1	7,5	7,8	8,6	9,1	9,2	7,8
Jasa lainnya	8,4	9,2	9,2	9,1	10,0	10,7	10,7	10,8
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	3.511	3.686	3.842	3.799	3.784	3.964	4.067	4.019

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2. Analisis PESTEL

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu isu utama yang bersifat jangka panjang dan berkaitan satu sama lain dengan berbagai aspek di dalam suatu negara, seperti politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya.

1.2.1 Politik

Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah melaksanakan pemilihan Presiden pada 2019 lalu, terlepas dari polemik yang ada nampaknya pemilihan Presiden terakhir ini menimbulkan bekas yang melekat bagi masing – masing pendukung. Di tahun 2020 ini dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di bulan Desember. Hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, kegiatan pilkada dirasa dapat menimbulkan kluster baru penularan virus, kendati demikian KPU tetap melaksanakan pilkada sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 26 tahun 2020 (Maharani, 2020). Upah minimum provinsi pada 2021 juga diputuskan tidak naik oleh pemerintah dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020, namun terdapat lima provinsi yang tetap menaikkan upah minimum provinsi di antara nya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (Mashabi, 2020). Dengan adanya Keamanan Negara, dalam membuka usaha sekarang ini menjadi lebih mudah dan aman.

Terkait dengan kebijakan tersebut, sesuai dengan tempat di mana penulis melakukan pengembangan bisnis di daerah Bulevar Hijau Bekasi, ketetapan kebijakan upah minimum di kota Bekasi mengalami kenaikan sebesar 8.03%.

1.2.2. Ekonomi

Pertumbuhan domestik bruto pada kuartal ke-III tahun 2020 diprediksi minus 3% yang artinya Indonesia masuk dalam resesi setelah pada kuartal ke-II minus 5,32%. Selain itu penyebab terjadinya resesi adalah turunnya konsumsi rumah tangga yang tercatat minus 4% serta investasi yang anjlok 6% (Asmara, 2020). Dampak Covid-19 juga menimbulkan deflasi yang terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September secara beruntun (Kencana, 2020). Hal tersebut merupakan indikasi dari lemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan pasokan yang cukup sehingga harga barang menjadi turun, yang paling merasakan dampak deflasi merupakan produsen dan pengusaha. Menurut BPS, dari 90 kota di Indonesia, 56 kota mengalami deflasi, dan 34 mengalami inflasi (Putri, 2020).

1.2.3 Sosial

Penduduk Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 271.066.000 jiwa (Gischa, 2020). Hal tersebut berarti Indonesia akan memiliki bonus demografi sebagai sebuah negara, tercatat pada Agustus tahun 2018 ada 124.004.950 angkatan kerja (Gischa, 2020). Keuntungan demografi yang akan didapat adalah banyaknya tenaga kerja berkualitas yang memungkinkan untuk bersaing secara regional dan internasional. Aset yang dikembangkan juga akan bertumbuh seiring dengan

bertumbuhnya aset angkatan kerja yang di investasikan ke aset produktif bukan konsumtif. Namun disamping keuntungan itu, penduduk lansia yang berpendidikan rendah bisa berpotensi untuk menjadi beban. Selama tahun 2019, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sebanyak 49,14% untuk kebutuhan makanan (Idris, 2020).

1.2.4 Teknologi

Platform teknologi sangat membantu perkembangan bisnis di era modern ini, mulai dari logistik, transportasi, pendanaan, penjualan, pembayaran, sudah ‘disentuh’ oleh teknologi. Semua hal bisa dilakukan hanya dengan 1 gadget yang sama, aplikasi seperti GoFood bahkan memiliki pelanggan mencapai 20 juta pada tahun 2019, dalam periode 2015 – 2019 GoFood mencetak penjualan per bulan mencapai 50 juta pesanan (Hastuti, 2020). Angka tersebut merupakan angka fantastis yang tentunya membawa dampak positif juga bagi pelaku usaha khususnya makanan dan minuman untuk menaikkan penjualan mereka serta mengenalkan produk mereka. Sosial media kini berubah menjadi media promosi yang paling populer menggantikan promosi yang dilakukan pada media mainstream sebelumnya seperti tv, koran maupun spanduk. Pembayaran yang semakin mudah tanpa menggunakan uang, cukup dengan handphone saja bisa membayar menu atau pembelian yang ada.

1.2.5 Lingkungan (*Environment*)

Luas hutan di Indonesia mencapai 99 juta hektar yang membentang dari bagian barat sampai bagian timur (Putri, 2020). Potensi kelautan juga mencapai 6 juta ton dalam 1 tahun. Di dalam negeri, aturan yang berhubungan dengan kelangsungan

lingkungan sudah mulai dilakukan yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta mulai 1 Juli 2020 di swalayan, pasar rakyat, serta pusat perbelanjaan (Velarosdela, 2020). Tercatat dari total sampah yang ada di tempat pembuangan akhir 34% diantaranya merupakan sampah plastik. Dalam Undang – Undang Cipta Kerja yang pada tahun 2020 diresmikan, Kementerian Lingkungan Hidup menjamin adanya penegakan hukum untuk menjaga lingkungan hidup dari eksploitasi (Wicaksono, 2020). Pencabutan izin usaha merupakan hukuman bagi pelanggar yang masih melakukan perusakan lingkungan.

1.2.6 Legal

Dalam setiap pendirian usaha tentu diperlukan surat izin pendirian usaha, serta diperlukan dokumen persetujuan dari lembaga terkait, di Indonesia apabila ingin memasarkan atau memproduksi barang makanan dan minuman maka diperlukan izin dari 2 pihak penting yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia karena 219.960.000 masyarakat Indonesia beragama Islam (Laveda, 2020). Pendirian usaha juga wajib disaksikan dan dilakukan di notaris yang dihadiri oleh pendiri baik individu maupun secara *partner*.